

## **REVITALISASI PENDIDIKAN YANG BERBASIS NASIONALISME : POSISI KHAS SEJARAH MEMBANGSA INDONESIA**

**Anhar Gonggong**

### ***ABSTRACT***

*This paper studies the importance of revitalizing the nationalism based education in Indonesia. The study starts with finding the relationship between education and nationalism during the Dutch occupation. It is then followed by the relevance between education and nationalism as the root of the Indonesian national movement. The writer gives examples of education which is developed by Muhammadiyah and Taman Siswa as an effort of revitalizing nationalism based education. At the end of this paper there will discussion on the importance of history subject in building the spirit of nationalism and patriotism.*

**Key words:** *educational revitalization, nationalism, Indonesia*

### **Pendahuluan : Pendidikan dan Nasionalisme di Negara Jajahan**

Pendidikan dan nasionalisme di negari-negari jajahan-termasuk di negari jajahan *Nederlandsch-indie* (baca : Hindia Belanda)-merupakan dua kekuatan dengan nilainya masing-masing yang memiliki daya pendorong-penggerak yang amat "dahsyat". Keduanya juga memang tidak dapat dipisahkan; keduanya adalah kekuatan-nilai pembebas-pemerdeka bangsa terjajah yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mewujudkan diri dan kemudian memerdekakan diri karena kedahsyatan daya penggerak dari pendidikan dan nasionalisme itu. Itu adalah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri, tidak dapat diabaikan, dan tidak dapat dilupakan.

---

**Dr. Anhar Gonggong**, adalah sejarawan yang mengajar di beberapa Perguruan Tinggi seperti Unika Atma Jaya Jakarta, Universitas negeri Jakarta, dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Jakarta.

### **Anhar Gonggong, *Revitalisasi Pendidikan ...***

Apa pendidikan dan apa nasionalisme, sehingga menjadi dua fakta sejarah yang menjadi kekuatan sejarah yang pada saatnya meruntuhkan kekuatan kekuasaan imperialis kolonialistik itu? Tentang pendidikan, seorang cendekia Islam, Prof. Khursid Ahmad, MA memberikan keterangannya, bahwa :

"Pendidikan bukanlah sekedar pengajaran umum. Pendidikan merupakan suatu proses; dengan pendidikan suatu bangsa mengembangkan kesadaran dirinya, melalui kesadaran diri individu-individu yang membentuknya. Pendidikan merupakan persiapan bagi generasi-generasi baru dalam kecakapan dan seni hidup dan dalam membuat mereka menyadari tugas dan kewajiban hidup mereka. Melalui pendidikan suatu bangsa mengeluarkan warisan kulturilnya dan intelektuilnya kepada generasi di masa depan dan memberi inspirasi kepada mereka dengan ideal-ideal hidup mereka. Pendidikan adalah suatu latihan mental, fisik, dan moral, dan tujuannya ialah memproduksi pria dan wanita yang berkebudayaan tinggi, yang cakap melakukan tugas-kewajiban mereka sebagai mahluk manusia yang baik dan sebagai warga negara yang patut. Inilah alam dan arti pendidikan, yang lahir dari pendidikan yang teliti dari pandangan-pandangan para ahli pendidikan dari segala zaman" (Ahmad, 1968: 8).

Pendidikan yang dijalankan di suatu negara tentu harus dilakukan berdasar pada suatu sistem pendidikan tertentu. Yang dimaksud dengan sistem pendidikan itu ialah :

"Setiap sistem pendidikan pada dasarnya terdiri dari suatu paduan ideal-ideal sosial tertentu, norma-norma dengan nilai-nilai dan didasarkan pada pandangan hidup dan kebudayaan tertentu. Dalam wilayah inilah meniru berarti bunuh diri. Di pihak lain, sejauh berhubungan dengan teknik dan metode, suatu negara dapat mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Tetapi haruslah sangat hati-hati dalam segi nilai-nilainya dan ideal-ideal mengambilmnya dengan sadar atau tidak sadar, dapat menghancurkan seluruh kerangka kebudayaan suatu bangsa" (Ahmad, 1968: ii).

Dalam perkembangannya kemudian, pemerintah penjajah-imperialis-kolonialis membuka lembaga-lembaga pendidikan di negeri-negeri jajahannya. Dalam kasus negeri jajahan *Nederlandsch-indie*, pemerintah kolonial membuka pendidikan karena kebutuhan pemerintah jajahan dan industri-industri perkebunan (swasta) mereka. Sejalan dengan itu, ketika pemerintah kolonial Belanda mengumumkan apa yang disebut dengan *etische politiek*, maka salah satu butir di

## Anhar Gonggong, *Revitalisasi Pendidikan ...*

antara tiga hal utama yang akan dijalankan sebagai "balas budi" kolonial terhadap anak negeri jajahan ialah *pendidikan*. Artinya, pemerintah kolonial memberi kemungkinan bagi warga pribumi untuk memasuki pendidikan model barat. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh orang-orang tua dengan memasukkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi.

Pendidikan pada level tertentu hanya dibuka di kota-kota tertentu, karena itu warga terdidik yang kemudian *menerima* dan *mengembangkan* ideologi nasionalisme pada umumnya adalah warga kota. Sebelum membicarakan nasionalisme di negeri jajahan Nederlandsch-indie, perlu dicatat bahwa dilihat dari perkembangan dan sifatnya, nasionalisme dibedakan sebagai berikut, yaitu *nasionalisme penjajah* dan *nasionalisme perlawanan pembebas*. Yang saya maksud dengan nasionalisme penjajah adalah nasionalisme yang bermula pada abad 19, yaitu nasionalisme Barat. Dalam abad itu, terjadi proses integrasi negara-negara feodal menjadi suatu kesatuan seperti yang dialami oleh Jerman dan Italia. Keadaan politik seperti itu merupakan hasil Kongres Wina (1818) yang mengembalikan kekuasaan penguasa/raja setelah sebelum perang Napoleon. Tidak hanya Italia dan Jerman yang berhasil melakukan proses integrasi yang melahirkan negara-bangsa, tetapi juga Perancis dan Inggris. Dengan berkembangnya negara-negara tersebut sebagai negara-negara industri, nasionalisme politik kemudian menopang nasionalisme ekonomi mereka (baca : imperialisme). Tuntutan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan nafsu imperialis-monopolis mereka pada akhirnya membawa negara-negara nasion itu menjadi negara-negara kolonialis. Singkatnya, *nasionalisme Barat* berkembang menjadi *nasionalisme chauvinistik yang kolonialistik*.

Perkembangan nasionalisme Barat yang kolonialistik berhasil menjajah wilayah-wilayah tertentu di Asia, Afrika selama sekian puluh , bahkan ratusan tahun. Namun setelah memasuki abad ke-20, di negeri-negeri koloni, termasuk di Nederlandsch-indie, berkembanglah *nasionalisme negeri terjajah* yang berwatak terbalik dengan nasionalisme Barat, nasionalisme yang mengintegrasikan, *nasionalisme yang memerdekakan*. Nah, pada sisi inilah perkaitan antara pendidikan-dalam arti warga pribumi yang telah memperoleh kesempatan menjalani (sistem) pendidikan Barat yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda di Nederlandschindie. Yang saya maksudkan dengan keterangan di atas ialah para warga *terdidik*, yang tidak sekedar terdidik-terpelajar dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, melainkan juga *tercerahkan*. Jadi, mereka adalah warga *terdidik-tercerahkan*, dan itulah yang mengembangkan *kesadaran baru* pada dirinya untuk menjadi nasionalis-nasionalis untuk menciptakan dan mewujudkan suatu bangsa baru dengan nama baru *Indonesia*. Kesadaran baru yang dimaksud mulai *berembrio* sejak awal abad ke-20.

### **Pendidikan dan Nasionalisme - Ideologi Pergerakan Nasional**

Tampilnya pergerakan yang dipelopori oleh warga terdidik-tercerahkan tentu-seperti telah disinggung di atas- karena berkembangnya kesadaran baru di antara warga pribumi tersebut. Karena itu memang harus diakui bahwa tampilnya warga terdidik-tercerahkan itu dimulai sejak warga pribumi dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan model Barat untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah itu seperti Sekolah Militer di Semarang (1826), Institut Bahasa Jawa di Surakarta (1832). Sekolah-sekolah tersebut diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan pegawai negeri pribumi. Baru pada 1871 dikeluarkan UU Pendidikan yang pertama yang membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi (Suharsih dan Ign Mahendra, 2007: 49).

Sampai dengan 1850 terdapat 562 sekolah dasar-dahulu disebut Sekolah Rakyat (SR)-yang lebih dari setengahnya dikelola oleh swasta. Dalam pengelolaan sekolah negeri tampak adanya diskriminasi kolonial-feodalistik, karena sekolah negeri di Jawa terbagi dalam dua kelas (jenis), yaitu *jenis* pertama dimaksudkan untuk para putra priyayi agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada anak-anak rakyat biasa, wong cilik. Sekolah negeri jenis pertama ini memberi pendidikan selama 5 tahun. Sekolah *jenis kedua* hanya sekedar memberi pelajaran menulis, membaca, dan berhitung. Pelajaran sekolah jenis pertama belum cukup untuk menempuh ujian *kleinambtenaar* (KA = pegawai rendah). Untuk mengikuti ujian *kleinambtenaar* itu diperlukan pelajaran bahasa Belanda yang hanya diberikan pada sekolah Eropa, ELS (*Europesche Lagere School*). Hanya sejumlah kecil anak-anak pribumi yang diterima di sekolah itu. Baru pada 1906 dikenalkan dengan luas sistem sekolah desa dengan biaya rendah dan pengurusannya, termasuk upah gurunya disediakan oleh desa itu sendiri. Selanjutnya, sejak 1912, sekolah jenis pertama diubah menjadi HIS (*Hollandsche Inlandsche School*). Kemudian perluasan pengajaran sekolah "tingkat atas" dilakukan secara berangsur. Pada 1912 STOVIA didirikan, pada 1913 NIAS dibentuk di Surabaya, setahun kemudian dibuka sekolah dokter hewan, dan pada 1927 sekolah kedokteran diubah menjadi HGS (*Geneeskundi Hoogeschool*) (Kartodirdjo, 1977: 61).

Walaupun pemerintah kolonial di Nederlandsch-indie telah mengembangkan pendidikan sejak pertengahan abad 19, namun hingga tahun 1920-an belum ada universitas di negeri jajahan ini. Hanya warga pribumi kaya-dan tentu pada umumnya berasal dari lingkungan bangsawan-feodal-yang mampu mengirim anak-anak mereka belajar di Eropa. Perguruan tinggi pertama di Nederlandsch-indie dibentuk pada 1920, yaitu Sekolah Tinggi Teknik (sekarang ITB) di Bandung. Kemudian disusul dengan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Tentu saja dibukanya sekolah-sekolah untuk strata yang lebih tinggi itu dilakukan sejalan dengan tujuan dari *Ethische Politiek* dan karena kebutuhan pemerintah kolonial untuk memperoleh tenaga-tenaga menengah dari lingkungan warga pribumi yang tentu akan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahannya. Dengan kata lain,

### **Anhar Gonggong, *Revitalisasi Pendidikan ...***

tujuan sekolah-sekolah tinggi itu dibuka tidak terlepas dari tujuan ekonomi dan efisiensi administrasi kolonialnya.

Untuk mendapatkan gambaran situasi keterdidikan warga pribumi di berbagai daerah di Nederlandsch-indie, khususnya dengan mengetahui sekolah rakyat di daerah-daerah itu, di bawah ini diberikan diagram Sekolah Rakyat pada 1900 (Suharsih dan Ign Mahendra, 2007: 51).

#### **Sekolah Dasar di Hindia Belanda sekitar tahun 1900**

<b>DAERAH</b>	<b>SEKOLAH NEGERI</b>	<b>SEKOLAH SWASTA</b>	<b>SEKOLAH MISI</b>	<b>TOTAL</b>	<b>POPULASI (dalam ribuan)</b>
Jawa dan Madura	269	31	62	562	28.386
Sumatera (kecuali Batak)	77	17	4	98	2.862
Daerah Batak	19	6	175	200	321 (?)
Kalimantan	12	3	21	36	1.076
Sulawesi (kecuali Manado)	14	-	-	14	1.442
					(1.895)
Manado	115	14	237	366	423(?)
Ternate	2	2	9	13	133 (?)
Ambon	74	75	17	166	271 (?)
Timur	15	10	16	41	306 (?)
					(1.905)
Bali dan Lombok	4	1	-	5	1.039
TOTAL	601	359	541	1.501	36.259 (?) - J

Di atas, salah satu lembaga pendidikan yang disebutkan ialah STOVIA-yang juga disebut dengan Sekolah Kedokteran Jawa-yang dibentuk pada 1902. STOVIA

kemudian diubah menjadi Fakultas Kedokteran pada 1927. Warga terdidik-tercerahkan anak-anak pribumi berawal dari lembaga pendidikan ini, dan karena itu merekalah yang menampakkan kesadaran baru untuk mengubah kenyataan anak-anak negeri jajahan *yang tertindas karena kebodohan mereka!* Dengan dipelopori oleh siswa Soetomo, pada 20 Mei 1908, bersama 9 orang siswa mengadakan rapat untuk membicarakan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh seorang "dokter Jawa" pensiunan, dr. Wahidin Sudirohusodo, yang menginginkan anak-anak pribumi (bangsa Jawa) untuk mendapatkan dana pendidikan. Hasil kerapatan mereka tidak hanya menyangkut pada "sekedar cara" untuk memperoleh dana pendidikan, melainkan lebih dari itu, membentuk organisasi dengan jangkauan tujuan yang lebih jauh ke depan. Nama organisasi itu ialah *Boedi Oetomo*.

"Organisasi modern" pertama ini harus diakui bersifat Jawasentris, bersifat *etnonasionalisme*, karena mereka yang diterima sebagai anggota adalah hanya orang-orang Jawa, dalam arti *lawa* dan *Madura*. Belakangan kemudian baru terbuka keanggotaan bagi etnis *Sunda* yang mayoritas berdiam di Jawa Barat. Sebelum bergabung dalam partai Bangsa Indonesia (PIB) yang dibentuk dr. Soetomo di Surabaya, Boedi Oetomo memang tetap sebagai organisasi "etnis", walau dalam kegiatannya selalu menduduki lembaga tingkat *Nederlandschindie*. Namun tampilnya Boedi Oetomo sebagai organisasi massa pertama dengan landasan *etnonasionalisme* Jawa itu bukanlah sesuatu "yang aneh", melainkan hal yang wajar, dalam arti bahwa kesadaran baru itu diawali oleh etnik mayoritas yang berdiam di *Nederlandsch-indie*, dan warga pulau Jawa adalah warga pribumi yang paling awal mendapat sentuhan pendidikan dan modernisasi. Tentang hal itu, seorang sejarawan yang memiliki otoritas tinggi di bidang ilmunya memberikan keterangan sebagai berikut :

"Diketahui umum bahwa pada titik awal perkembangannya, pergerakan nasional berbentuk *etnonasionalisme*, suatu bentuk yang wajar sekali. Dipandang secara kontekstual, memang bentuk itu benar-benar menunjukkan suatu *Kulturgebundenheit* atau juga *Zeitgebundenheit*. Hal itu wajar karena proses integrasi belum berjalan cukup maju sesuai dengan derajat komunikasi serta transportasi waktu itu, yang menyebabkan golongan-golongan etnis banyak bergaul dan bercampur" (Kartodirdjo, 1999: 24 – 25).

## Anhar Gonggong, *Revitalisasi Pendidikan ...*

Tampilnya warga pribumi etnik itu, juga karena mereka mengalami pemahaman baru tentang milik dirinya, yang selama ini-dalam sistem pemerintahan dan masyarakat kolonial-terpinggirkan. Dalam bidang politik-menurut Prof. Sartono Kartodirdjo-kelompok etnik itu menuntut otonomi, sedang dalam bidang kebudayaan menginginkan agar bahasa dan adat istiadat dipertahankan. Di samping itu, besar pula idealisme untuk memperbaiki tingkat kehidupan dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dirasakan betapa berat keterbelakangan yang membelenggu rakyat (Kartodirdjo, 1999: 24 – 25).

Dalam kaitan dengan pembentukan organisasi-dalam hal ini Boedi Oetomo dan organisasi-organisasi yang menyusul kemudian-tidak hanya sebagai aktivitas membangun, melainkan sekaligus sebagai simbol baru dari identitas. Organisasi itu pun berfungsi sebagai forum komunikasi baru dan arena politik tempat mereka berkumpul, mengadakan rapat, dan berdiskusi. Dalam kaitan itu, perlu pula dicatat bahwa dalam perkembangannya kemudian, lahirlah sekian banyak organisasi-organisasi modern dengan ideologi dan tujuan mereka masing-masing. *Indische Partij (1911)* dibentuk oleh tiga serangkai Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Lahir pula Sarekat Islam (1912), PKI (1920), kemudian PNI yang dibentuk oleh Soekarno (1927). Kemudian ada juga RARI yang dibentuk Tan Malaka di luar negeri, ada juga Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda, dan lain-lain. Ideologi yang mereka anut bermacam-macam, seperti *nasionalisme Hindia* yang dikembangkan oleh Douwes Dekker melalui Indische Partij, Haji Samanhudi-HOS Cokroaminoto yang mengembangkan ideologi Islami, Semaun mengembangkan ideologi komunis melalui PKI, komunis-troskist dikembangkan Tan Malaka, Perhimpunan Indonesia juga mengembangkan ideologi nasionalisme, dan lain-lain.

Nasionalisme di negeri-negeri jajahan merupakan hal yang bersifat ideologi *antikolonialisme*. Sejalan dengan itu, Perhimpunan Indonesia merumuskan prinsip-prinsip nasionalisme, yang terdiri dari :

1. Kesatuan (*unity*) yang mentransformasikan hal-hal yang polimorfik menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi.
2. Kebebasan (*liberty*), khususnya bagi negeri-negeri jajahan yang memperjuangkan pembebasan dari kolonialisme.
3. Kesamaan (*equality*) sebagai bagian implisit dari masyarakat demokratis yang merupakan antithese dari masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter.
4. Kepribadian (*identity*) yang lenyap karena negasi kaum kolonial.
5. Prestasi amat diperlukan untuk menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi negara nasion (Kartodirdjo, 1999: 10 – 11).

Dari pendirian yang dirumuskan di atas, terlihat bahwa : "Bagi Indonesia, dari pandangan historis sudah jelas bahwa proses perkembangan nasionalisme mengintegrasikan pelbagai golongan etnis menjadi kesatuan berbentuk negara nasion. Dalam konteks historis ini, nasionalisme berfungsi selaku ideologi yang merupakan orientasi tujuan gerakan sosial-politik suatu kontra ideologi terhadap kolonialisme" (Kartodirdjo, 1999: 25).

### **Revitalisasi Pendidikan yang berbasis Nasionalisme**

Pendidikan yang diterangkan secara singkat di atas, hanya yang berkaitan dengan hasil pendidikannya saja, dalam arti lahirnya warga pribumi terdidik-tercerahkan yang membangun kesadaran baru untuk melangkah ke hari depan yang dalam masyarakat kolonial *tersingkirkan*. Kesadaran baru itulah yang mendorong mereka tampil ke depan dengan "seruan" untuk menjadi *suatu bangsa baru yang satu-bersatu* dan bertegak berhadapan dengan kekuatan kekuasaan imperialis-kolonialis Belanda yang telah puluhan tahun meniadakan keberadaan diri dan kemanusiaannya. Singkatnya, warga pribumi yang terdidik-tercerahkan menjadikan ideologi nasionalisme sebagai kekuatan pembebas baru dari kungkungan kekuatan kekuasaan Belanda.

Di tengah-tengah situasi dinamis masyarakat kolonialis pribumi untuk membangun dan menyebarkan ideologi nasionalisme sebagai kekuatan anti kolonialisme, sejumlah warga yang sadar-selain mereka yang memprakarsai terbentuknya Boedi Oetomo-mengambil inisiatif mendirikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai *alat perjuangan*. Artinya, lembaga-lembaga pendidikan dikelola dengan sistem pendidikannya sendiri dan dengan kurikulum yang dirancang sendiri. Pada sisi inilah arti penting dari posisi khas Muhammadiyah dan Taman Siswa.

Muhammadiyah dibangun oleh K.H. Ahmad Dahlan tidak hanya melakukan "pembaharuan" dalam ajaran-ajaran Islam, melainkan juga terutama melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan. K.H. Ahmad Dahlan memprakarsai pendidikan yang "diadopsi" dari pendidikan Barat-antara lain dengan mengadakan sistem kelas. Namun adopsi pendidikan Barat ini tidak berarti tanpa mengaitkannya dengan pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikannya memasukkan pelajaran agama "sejajar" dengan mata pelajaran lainnya yang "bersifat umum". Sedang Taman Siswa yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara menjalankan sistem pendidikannya sendiri dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang bersifat kebudayaan dan kesenian. Kedua lembaga pendidikan ini mempunyai kekuatan yang khas di tengah-tengah sistem pendidikan kolonialistik yang bersifat diskriminatif. Kedua lembaga itu juga tampil sebagai kekuatan yang menyebarkan kesadaran



baru ke tengah-tengah lingkungan warga pribumi yang mengalami pendidikan di kedua lembaga pendidikan tersebut.

Kalau kita menelusuri keberadaan dan peranan pendidikan dalam periode pergerakan nasional-sebagaimana yang digambarkan pada bagian kedua makalah ini dan awal dari bagian ketiga ini-tampak betapa vitalitas pendidikan sangat kuat hingga mampu mengembangkan ideologi nasionalisme yang antikolonial yang mempersatukan warga pribumi Nederlandschindie untuk mengubah nasib anak negeri jajahan ini di hari depan kelak. Warga terdidik tercerahkan itu merumuskan diri sebagai bangsa baru dan dengan kesadaran baru yang berhasil mengembalikan identitas diri, harga diri, dan kemanusiaan mereka yang selama periode penjajahan kolonialistik Belanda, *telah dipinggirkan, bahkan dihilangkan!*

Dalam periode pergerakan nasional, 1908-1945, para pemimpin dan tokoh-tokoh pergerakan tidak hanya membentuk organisasi politik perlawanan dan (mempunyai) ideologi gerakan mereka, melainkan dalam jarak waktu itu, mereka merumuskan simbol-simbol dan perangkat-perangkat kelangsungan hidup mereka yang satu-bersatu dan "merdeka" di hari depan. Apa yang mereka hasilkan dalam periode  $\pm$  37 tahun itu ialah nama diri sebagai bangsa baru *Indonesia*, ideologi bangsa-negara *Pancasila*, dan *kemerdekaan*. Itulah yang kita warisi dan menjadi milik bersama kita sebagai bangsa-negara merdeka sampai sekarang.

Namun jika vitalitas pendidikan yang didirikan pemerintah kolonial dan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah dan Taman Siswa dibandingkan dengan vitalitas pendidikan setelah kemerdekaan, tentu sangat berbeda. Yang saya maksud ialah produk pendidikan dari periode pergerakan kemerdekaan telah menghasilkan warga terdidik tercerahkan dengan menerima nilai-nilai terpenting yang di internalisasikannya di dalam dirinya, yaitu *kejujuran, keberanian, ketabahan*, dan tentu juga "*keimanan*" sebagai insan yang percaya kepada Tuhan. Nilai-nilai yang mencerahkan itulah yang menyebabkan mereka adalah *pemimpin yang mampu, bersedia melampaui dirinya!* Pertanda dari kesediaan mereka melampaui dirinya itu antara lain, *mereka lebih bersedia untuk menderita!* Kesediaan mereka untuk melampaui diri, untuk menderita itulah yang membawa kita, bangsa ini, *merdeka!*

Dalam jarak waktu kemerdekaan bangsa-negara kita, persoalan peranan-pelaksanaan pendidikan dan nasionalisme sering tampil sebagai bahan dialogis-polemik di antara pelbagai pihak, terutama karena dilandasi oleh adanya anggapan bahwa pendidikan kita sudah mengalami kemunduran, dalam arti kurangnya-untuk tidak mengatakan hilangnya-penghayatan nilai-nilai dasar yang seharusnya juga dapat "ditransfer dan diserap" melalui pendidikan. Sejalan dengan itu, yang diperoleh melalui pendidikan-dan itu merupakan tujuan utamanya-ialah "ilmu murni" dan "melupakan" transfer pengetahuan dalam arti "pengalaman yang bermakna". Itu sebabnya dewasa ini amat banyak warga usia sekolah berusaha memasuki jalur pendidikan untuk mengejar gelar dan ijazah dengan kelulusan "terbaik" dalam bidang ilmunya, tetapi "minim" pengetahuan. Gelar-ijazah

## Anhar Gonggong, *Revitalisasi Pendidikan ...*

adalah kebanggaan-yang mungkin kosong-dan tanpa rasa malu dipasang-deretkan di depan atau di belakang nama pemilik gelar-gelar yang bersangkutan.

Namun di balik gelar berderet itu, kita tidak menemukan nilai-nilai dasar yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia bergelar keilmuan-pengetahuan sebagaimana yang seharusnya. Gejala yang mengkhawatirkan-dilihat dari sudut transformasi nilai-nilai dasar di hari depan-sedang melanda lembaga-lembaga pendidikan kita sejak beberapa tahun ini, terutama sejak reformasi, yaitu terjadi kecurangan *a moral* saat mengikuti *ujian resmi* untuk tingkat pendidikan menengah dan tes masuk pendidikan tinggi. Celakanya, kecurangan itu justru dilakukan oleh kepala sekolah/guru sekolah yang membocorkan ujian dan/atau memberikan jawaban kepada siswa-siswa mereka agar dapat menjawab pertanyaan ujian secara benar; namun dengan cara yang curang. Demikian pula, kita setiap tahun membaca dan mengetahui melalui media massa, *tertangkapnya* sejumlah orang yang menjadi *joki* bagi seorang peserta ujian dengan imbalan jutaan rupiah. Terungkapnya pelbagai bentuk kecurangan di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan kita itu menunjukkan betapa nilai-nilai dasar *kejujuran* dan *ketabahan* bukan lagi menjadi bagian dari pendidikan di negeri kita.

Tentu saja itu terjadi karena pelbagai faktor, baik yang berkembang di dalam masyarakat bangsa-negara kita, maupun karena itu merupakan bagian dari dampak dari luar, lingkungan eksternal yang bersifat mondial-globalis. Secara internal, masyarakat kita memang mengalami perubahan utama yang mendorong pandangan masyarakat-terutama warga usia mudanya-terhadap fungsi pendidikan dan makna nasionalisme. Pendidikan dalam konteks waktu sekarang, lebih dipandang sebagai alat untuk mengubah tingkat kesejahteraan secara lebih cepat. Karena itu, pendidikan juga harus ditempuh dalam jarak waktu yang secepat mungkin. Untuk mendapatkan kesejahteraan (terutama yang bersifat fisik-material) setiap orang tidak akan mungkin memperolehnya dengan mudah, karena harus melalui liku-liku persaingan yang ketat. Demikian pula faktor eksternal, memberikan dampak yang sangat besar. Gejala "tidak berlakunya lagi" batas wilayah negara mengubah pemahaman kita tentang diri kita sebagai bangsa. Berkembangnya "pemahaman baru" tentang kebangsaan di tengah "ketiadaan" batas wilayah negara itu, mengubah pula makna diri kita sebagai warga dari suatu bangsa yang berbeda dengan yang dipahami oleh generasi lampau. Terjadinya perbedaan pemahaman makna nasionalisme antar generasi itu menyebabkan generasi yang "lebih tua" sering melontarkan semacam kecaman yang menuduh generasi (yang lebih) muda sudah mengalami pemahaman yang dangkal tentang nasionalisme itu. Pemahaman dangkal itu kemudian dilanjutkan dengan tuduhan menurunnya pula jiwa patriotism generasi muda itu.

Tentu saja "tuduhan-tuduhan" terhadap generasi muda itu tidak sepenuhnya benar. Kalau toh itu benar, itu juga merupakan kesalahan dari pengambil dan penentu kebijakan yang menjalankan kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Pada sisi inilah (mungkin) diperlukan suatu sistem pendidikan yang mampu melakukan *revitalisasi pendidikan yang berbasis nasionalisme*. Yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan

## Anhar Gonggong, *Revitalisasi Pendidikan ...*

yang berbasis nasionalisme ialah sistem pendidikan yang mengembalikan *vitalitas*, kekuatan pendidikan yang ditopang oleh pemahaman kebangsaan diri kita, *yang lebih terinternalisasi dalam diri setiap anak didik dan semua unsur pengelola pendidikan*. Langkah untuk melakukan revitalisasi pendidikan yang berbasis nasionalisme itu bukanlah suatu pekerjaan mudah. Usaha itu mengandung liku-liku konseptual dan program-program yang rumit.

Sejalan dengan kemajuan untuk penguatan kembali pendidikan yang di dalamnya akan pula meningkatkan pemahaman diri kita sebagai bangsa-negara merdeka, pertanyaan yang awal ialah dari mana akan dimulai untuk kita melihat kembali sistem dan program serta kurikulum pendidikan kita yang selama ini dijalankan, dan yang akan dijalankan. Dalam kaitan itu, kita dapat mendasarkan diri pada pemahaman dan prinsip pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas No. 20/2003) yang merupakan Undang-Undang pendidikan nasional kita yang terbaru. Karena itu, ada baiknya jika kita memperhatikan beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU tersebut. Dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1, ayat (2) disebutkan bahwa "Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *yang berakar pada* nilai-nilai agama, kebudayaan nasionalisme Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Kemudian kita melihat pula isi Bab II : Dasar, Fungsi, dan Tujuan, yang pada pasal 2 disebutkan bahwa "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; dan dilanjutkan dengan kalimat : "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan pasal 4, ayat (1) dikatakan bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa" (UU Sisdiknas, 2009).

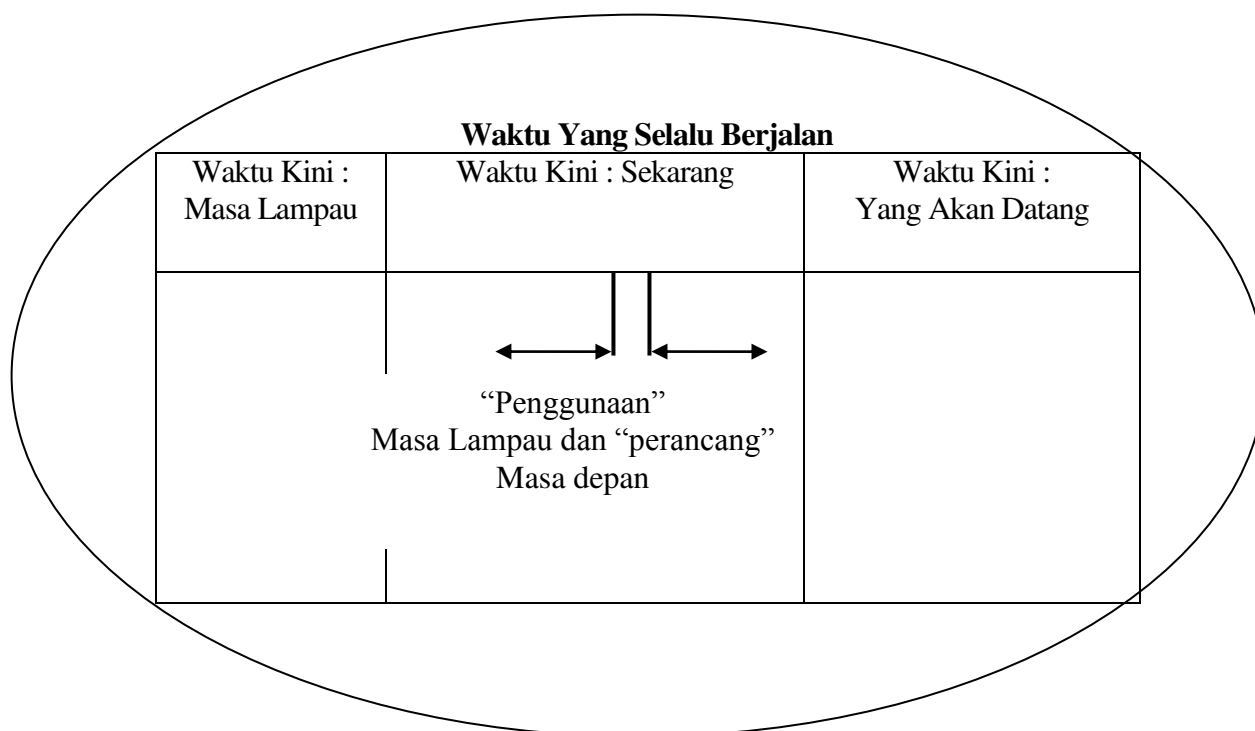
Kalau kita memperhatikan ketentuan dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 seperti dikutip di atas, sebenarnya pendidikan yang kita jalankan justru memang ditopang oleh kekuatan nasionalisme yang bertujuan untuk menciptakan manusia terdidik yang memiliki nilai-nilai dasar manusia dengan nilai kemanusiaannya. Kalau begitu mengapa terjadi reaksi-reaksi yang meragukan *vitalitas* pendidikan untuk menciptakan produknya yang nasionalistik-patriotik. Hal itu (mungkin) terjadi karena penyelenggaraan dan praktek kurikulumnya. Kecenderungan kurikulum yang "mengabaikan" mata pelajaran-mata pelajaran ilmu sosial dan budaya humaniora yang berkaitan dengan pembentukan watak, kepribadian, dan moralitas yang sebenarnya tidak hanya mengandung keilmuannya, melainkan juga mengandung pengetahuan, pengalaman kemanusiaan. Tidak diberikannya

mata pelajaran humaniora kepada siswa jurusan *eksakta*, ilmu pengetahuan alam, menunjukkan pengabaian arti penting sumbangan ilmu pengetahuan humaniora itu dalam menciptakan manusia berwawasan kebangsaan yang kuat.

**Penutup : Pendidikan Sejarah untuk Mengembangkan Bibit Nasionalis-Patriotis**

David M. Smick-penasehat ekonomi presiden Amerika, baik dari partai demokrat maupun partai republik-dalam mengakhiri makan siangnya dengan seorang kawan, mengatakan : "Mungkin yang paling mengganggu, ... adalah kebanyakan orang sekarang ini *tidak punya perspektif sejarah*" (Smick, 2009: 18). Dalam konteks situasi masyarakat bangsa-negara kita yang berbeda dengan Amerika Serikat negara David M Smick, mungkin juga kita dapat memahami kritik "generasi tua" (baca : angkatan '45 dan '66) kepada generasi muda tahun 1970-an dan generasi muda kini yang dianggap mengalami degradasi, mengalami krisis nasionalisme dan patriotisme. Generasi muda kini-meminjam Smick-tidak punya perspektif sejarah.

Tanpa harus setuju sepenuhnya terhadap anggapan generasi tua terhadap generasi muda seperti yang disebut di atas, di sini kami ingin menegaskan bahwa usaha memperbaiki pengajaran-pendidikan sejarah haruslah dilanjutkan dengan menekankan bahwa sejarah yang diajarkan itu bukanlah sekedar rangkaian peristiwa masa lampau, *tanpa makna*. Artinya, peristiwa yang dilepas dari kaitannya dengan masa kini dan masa depan. Sejarah selalu berada di dalam proses waktu yang selalu terkait. Karena itu, sejarah selalu berada-beredar dalam kekiniannya. Untuk jelasnya, mungkin bagan di bawah ini dapat memberi wawasan kepada kita.



Dari gambar di atas terlihat bahwa waktu selalu beredar tanpa henti; dan dalam proses waktu itulah manusia (termasuk manusia Indonesia) menjalankan peran kemanusiaannya yang menyejarah. Dalam kaitan itu, manusia generasi *sekarang* yang hidup menyejarah dalam waktu kini yang selalu menggunakan peristiwa masa lampau untuk menjadi tempat memperoleh bahan banding bagi hidupnya sebagai generasi sekarang. Posisi khas dari generasi sekarang karena ia juga menggunakan pengalaman berdasar peristiwa lampau itu dan pengalamannya sebagai generasi sekarang untuk "merancang" masa depan. Mungkin sejalan dengan keterangan di atas, ketika pemahaman historical-ditulis oleh Daniel Dhakidae-yang menyatakan : "... historical" di sini masa lalu akan tetapi mencakup masa depan dengan menggenggam kuat kekinian sambil memproyeksikan dirinya ke masa lalu. Dengan begitu, warisan menjadi penting, namun bukan karena semata-mata warisan, akan tetapi warisan yang secara efektif menentukan relevansi kekinian" (Dhakidae, 2002: xxxii).

Adanya pelbagai kritik terhadap generasi muda oleh generasi tua itu, menyangkut juga pada identitas nasionalnya. Sehubungan dengan itu, sangat berguna untuk menyimak apa yang pernah ditulis Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo yang mengaitkan sejarah dan identitas nasional. Beliau menulis

### Anhar Gonggong, *Revitalisasi Pendidikan ...*

"Telah ada konsensus umum bahwa suatu nasion terbentuk berdasarkan kebersamaan pelbagai faktor, antara lain, kemauan politik, tertitorium, kultur, bahasa, agama, etnisitas, dan yang sangat esensial : nasib bersama atau pengalaman bersama. Faktor-faktor tersebut acapkali kehadirannya tidak selalu mutlak, kecuali faktor pertama dan terakhir, yang kehadirannya *condition sinequa non*.

Sehubungan dengan itu, bila sejarah nasional sebagai tuangan pengalaman kolektif bangsa merupakan karakteristik pokok bagi bangsa bersangkutan. Solidaritas nasional yang berlandaskan kesadaran kolektif akan sejarah, seperti halnya pada perkembangan pribadi, membentuk kepribadian kolektif atau kepribadian nasional. Jelas pula bahwa identitas kolektif pun menunjukkan kepada kepribadian nasional. Oleh sebab itu, *dapat dikatakan bahwa identitas nasional sinonim dengan sejarah nasional*" (Kartodirdjo, 1999: 69 – 70).

Selanjutnya, dikatakan pula :

"Sehubungan dengan itu, perlu pula disadari bahwa *sejarah* sebagai ungkapan pengalaman kolektif itu sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas eksistensi serta menjadi legitimasi penyelenggaraan kehidupan nasional" (Kartodirdjo, 1999: 71).

Dari keterangan di atas, nampak betapa penting posisi pendidikan sejarah untuk menciptakan kesadaran sejarah dalam rangka membangun identitas nasional. Dari keterangan itu, kita dapat menyatakan bahwa kurikulum pendidikan nasional yang mengabaikan sejarah sebagai mata pelajaran adalah sangat *keliru*, karena tanpa pemahaman sejarah kolektif (menjadi) bangsa, akan memungkinkan peserta didik tidak mengenal diri, karena tidak mengenal landasan identitas dirinya. Dalam rangka untuk melakukan usaha revitalisasi pendidikan yang berbasis nasionalisme, sangat penting-strategis untuk memberikan mata pelajaran sejarah dan antropologi Indonesia kepada peserta didik dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, dan untuk semua jurusan!

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kurshid. (1968). *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam*. Diterjemahkan dari judul asli: “*The Principles of Islamic Education*” oleh M. Hashem. Surabaya: Al Ma’arif – Japi.
- Dhakidae, Daniel. 2002. “Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang,” dalam Benedict Anderson. *Komunitas Terbayang*. Terjemahan buku “*Imagined Community*” oleh Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Insist Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- , 1999. *Ideologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa : Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio-kultural*. Jakarta: Pabelan Jayakarta.
- Smick, David M. 2009. *Kiamat Ekonomi Global*. Terjemahan buku “*The World is Curved Krisis 2007 – 2008*” oleh Arfan Achyar. Jakarta: Daras Books.
- Suharsih dan Ign. Mahendra K. (2007). *Bergerak Bersama Rakyat : Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Resist Book.
- Tim Penyusun. 2009. *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)*. Bandung: Fokusmedia.